



Seminar Dies ke-22 Fakultas Sastra
“Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta
dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Sejarah”

MULTIKULTURALISME DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

oleh

Lucia Juningsih
Program Studi Sejarah



Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | 27 April 2015

MULTIKULTURALISME DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH¹

*Lucia Juningsih*²

Program Studi Sejarah

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

1. Pendahuluan

“Untaian Zamrud melingkar di Khatulistiwa” demikian kata Multatuli menyebut wilayah Hindia Belanda,³ sebagai suatu wilayah yang memiliki banyak pulau (sekitar 13.667 pulau) dengan kekayaan alam yang sangat besar, di dalamnya tinggal berbagai etnis (358) dan sub etnis (200). Masing-masing etnis tersebut memiliki budaya, adat istiadat, tradisi, kuliner, bahasa, musik, tari, dan busana yang berbeda. Sebagian besar dari mereka menganut agama Islam dan sebagian kecil menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya. Dari berbagai etnis itu, etnis Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan Bugis merupakan etnis yang jumlah anggotanya cukup besar. Dengan kata lain, penduduk Indonesia bersifat majemuk. Kemajemukan tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat melahirkan konflik yang berkepanjangan yang dapat berujung pada kerusuhan sosial. Paling tidak pada dekade terakhir abad ke-20, sejumlah konflik dan kerusuhan sosial yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) terjadi di berbagai daerah seperti di Sampit, Sambas, Ambon, dan Poso.

Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia memiliki penduduk yang majemuk, juga tidak lepas dari berbagai persoalan tersebut. Sejak awal pertumbuhannya, paling tidak pada abad ke-18, penduduk kota Yogyakarta bersifat majemuk. Selain orang pribumi (orang Jawa), terdapat orang Cina, Arab, Bugis, dan Eropa.⁴ Pada abad ke-20, masyarakat Yogyakarta semakin majemuk. Seiring dengan perkembangan pendidikan, banyak penduduk dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong ke Yogyakarta untuk menimba ilmu. Demikian pula, banyak penduduk dari berbagai wilayah migrasi ke Yogyakarta untuk bekerja dan bermukim. Tidak berlebihan jika Sultan mengatakan “Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia”. Keberagaman atau kemajemukan di Yogyakarta ini dapat pula melahirkan konflik yang berujung pada kerusuhan sosial. Paling tidak pada dekade kedua abad ke-21, di Yogyakarta terjadi tindak kekerasan yang berlatar belakang SARA. Pada tahun 2014-an, misalnya, terjadi “penyerbuan” kelompok agama tertentu terhadap kelompok agama yang lain yang sedang menjalankan ibadah. Kota Yogyakarta sebagai kota tua di Jawa dengan kemajemukan penduduknya menarik untuk dibahas. Dalam kesempatan ini hendak didiskusikan mengenai multikulturalisme di kota Yogyakarta dalam perspektif sejarah.

¹ Dipresentasikan dalam acara Dies Natalis Fakultas Sastra, USD ke-22 pada hari Senin tanggal 27 April 2015 di USD, Yogyakarta.

² Dosen di Prodi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

³ J.S. Furnival, *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk* (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 1.

⁴ Inajati Adrisijanti, “Kota Yogyakarta Sebagai Kawasan Pusaka”, Disajikan dalam Diskusi Sejarah “Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah”, yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 11 -12 April 2007, hlm. 1.

2. Dari Hutan hingga Ibu Kota Republik Indonesia

Kota Yogyakarta memiliki sejarah yang sangat panjang. Diawali dengan Perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Sunan Paku Buwana III dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 12 Februari 1755, sebagai bentuk pengakuan keberadaan Keraton Yogyakarta. Keesokan harinya diresmikan kedudukan Mangkubumi sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar Hamengku Buwana.⁵ Apa yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi setelah diangkat sebagai Sultan? Sultan membuat berbagai kebijakan, salah satunya yakni membangun keraton dengan berbagai macam sarana dan prasarana, untuk memudahhi aktivitas pemerintahan.⁶ Kemudian Sultan Hamengku Buwana I dan penerusnya mengembangkan wilayah keraton untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, memudahhi berbagai aktivitas seperti kegiatan politik, sosial, ekonomi, agama dan budaya, serta pemukiman penduduk.⁷

Lokasi kota Yogyakarta mencakup kawasan keraton hingga kawasan kepatihan. Di dalam kawasan itu berdiri berbagai bangunan, yang masing-masing bangunan mempunyai fungsi yang berbeda, yang sekaligus juga menunjukkan status sosial penghuninya. Bangunan-bangunan itu ditata dalam suatu pola yang teratur yakni ada *alun-alun lor* (utara) yang merupakan pusat kota dan dikelilingi oleh beberapa bangunan yakni masjid agung di sebelah barat, keraton di sebelah selatan, pasar di sebelah utara, serta *alun-alun kidul* (selatan).⁸ Bangunan tersebut merupakan representasi dari aspek kehidupan politik, sosial, keagamaan, dan ekonomi.

Pemukiman penduduk tersebar mengelilingi kawasan kota antara lain Pacinan yakni pemukiman orang-orang Tionghoa, Kampung Sayidan yakni pemukiman orang Arab, Kampung Gerjen yakni pemukiman para penjahit, Kampung Dagen yakni pemukiman tukang kayu, Kampung Siliran yakni pemukiman abdi dalem silir (mengurus lampu), Kampung Gamelan yakni pemukiman abdi dalem gamel (pemelihara kuda), Mangkubumen yakni tempat tinggal Pangeran Mangkubumi, Kampung Wijilan yakni tempat tinggal Pangeran Wijil, dan Kampung Bugisan yakni pemukiman abdi dalem Prajurit Bugis. Orang Eropa tinggal di kawasan utara keraton (Gedung Agung), Benteng *Vredenburg*, Bintaran, Gereja Margamulya dan Kidul Loji, serta Loji Kecil. Pemukiman atau kampung-kampung itu menunjukkan status sosial, profesi, dan etnis dari penghuninya.⁹

Kedatangan orang Tionghoa dan orang Arab di kota Yogyakarta karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi yakni perdagangan.¹⁰ Demikian pula, kedatangan orang-orang Belanda ke kota Yogyakarta juga berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan ekonomi yakni usaha perkebunan dan pabrik.¹¹ Dalam perkembangannya, orang Eropa bermukim di Yogyakarta karena berkaitan dengan kegiatan pendidikan danewartakan agama.

⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium*. Jilid 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 233.

⁶ Sultan beserta kerabatnya tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang (Gamping). Setelah keraton selesai dibangun pada tanggal 13 Sura 1682 J = 7 Oktober 1756 TU Sultan pindah ke keraton. Lihat Inajati Adrisijanti, *op. cit.*, hlm 1-2.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁰ Dengan izin Sultan Hamengku Buwono II, etnis Tionghoa dapat menetap di tanah yang terletak di utara pasar Beringharjo dengan harapan aktivitas pasar terdorong oleh perdagangan mereka. "Pecinan-Ketandan, Yogyakarta" <http://pecinanjogja.blogspot.com/p/akuuuuuu.html>, diunduh tanggal 31 Maret 2015, jam 10.21.

¹¹ Inajati Adrisijanti, *op. cit.*, hlm. 2-3.

Ketika jumlah orang Eropa semakin besar, pada awal abad XX dibuat permukiman baru untuk orang Eropa berdasarkan konsep arsitektur modern, permukiman ini dinamakan *Nieuwe Wijk* yang kemudian dikenal dengan nama Kotabaru.¹²

Dapat dikatakan, paling tidak pada abad ke-18 penduduk Yogyakarta telah bersifat majemuk. Hal ini sama dengan masyarakat Hindia Belanda yang bersifat majemuk seperti yang dikatakan oleh J.S. Furnivall. Dalam masyarakat majemuk itu terdapat berbagai golongan sosial yang masing-masing memainkan peran ekonomi yang berbeda, tidak saling berbaaur meskipun masing-masing golongan hidup saling berdampingan dalam satu kesatuan politik yaitu Hindia Belanda. Masyarakat majemuk menurut Furnivall (1944) terdiri atas dua elemen atau lebih yang hidup sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.¹³ Sebagai masyarakat majemuk, Indonesia dipandang sebagai tipe masyarakat daerah tropis di mana antara pemegang kekuasaan dan yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Kelas penguasa yakni orang Belanda merupakan minoritas, dan yang dikuasai terdiri dari sejumlah ras yang berbeda. Penduduk bumiputera yang merupakan penduduk mayoritas menempati lapisan bawah dan menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Sementara itu, orang Tionghoa menempati lapisan menengah terbesar di antara orang timur asing lainnya (Arab, India).

Setiap etnis tersebut memegang budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan pandangan hidup sendiri. Relasi sosial terjalin berdasarkan status sosial, warna kulit, dan agama. Orang Belanda lebih banyak bergaul dengan komunitas kulit putih. Mereka menganggap orang kulit putih lebih unggul dari ras lain, paling berbudaya dan beradab. Oleh karena itu, mereka memiliki tugas suci untuk membudayakan dan memberadabkan orang kulit berwarna.¹⁴ Orang Eropa menganggap penduduk pribumi sebagai manusia-manusia yang berlimpah sinar matahari, tetapi pemalas dan bodoh.¹⁵ Penduduk Jawa berhubungan dengan orang Tionghoa dan Arab berdasarkan pada kepentingan ekonomi. Sebagai individu-individu mereka saling bertemu, tetapi pertemuan itu sebatas pada kegiatan jual beli di pasar. Inilah masyarakat majemuk dengan bagian-bagian komunitas yang hidup berdampingan, tetapi terpisah dalam satuan politik yang sama.

Bagaimana relasi antaretnis di kota Yogyakarta? Relasi sosial antaretnis terjalin berdasarkan status sosial, warna kulit, dan agama. Setiap etnis itu menganggap budayanya paling unggul yakni paling berbudaya dan beradab, sementara etnis lain dipandang tidak berbudaya dan beradab.¹⁶ Keluarga keraton dengan status sosialnya yang tinggi, bergaul dengan kelompok kelas sosial yang sama. Demikian pula masyarakat kelas bawah, mereka juga memiliki relasi sosial sendiri, bergaul dengan kelompoknya. Kelompok sosial kelas atas menguasai kelompok sosial kelas bawah. Kelompok sosial kelas atas menghisap, mengeksploitasi, memaksa kelompok sosial kelas bawah untuk memberikan pelayanan-pelayanan. Kelompok sosial kelas bawah seperti petani dan buruh nyaris tidak memiliki hak, tetapi yang dimiliki adalah kewajiban. Sementara itu,

¹² Anton Haryono, "Industri Pribumi Daerah Yogyakarta Masa Kolonial 1830-an-1930-an". *Disertasi*, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 52-53.

¹³ J.S. Furnivall, *op. cit.*, hlm. xxvii.

¹⁴ G. Moedjanto, *Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003), hlm. 12.

¹⁵ Lihat S.H. Ali Alatas, *Mitos Pribumi Malas Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial* (Jakarta: LP3ES, 1988), lihat juga Hikmat Budiman, *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁶ Lihat Historiografi tradisional seperti Babad, Kitab seperti Pararaton dan Negara Kertagama, menggambarkan kehidupan di dalam lingkungan kraton itu berbudaya dan beradab, sedangkan kehidupan luar kraton itu barbar.

orang Tionghoa dan juga orang Arab yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang melakukan relasi sosial dengan etnis lain sebatas pada kepentingan ekonomi. Masing-masing etnis itu menjalani hidup mereka sendiri dan mereka saling terpisah meskipun pemukimannya berdampingan. Dapat dikatakan, dalam kasultanan tidak ada demokrasi. Kekuasaan mutlak ada pada penguasa keraton. Demikian pula, hak-hak asasi manusia diabaikan, hukum yang berlaku tidak berpihak pada orang kecil.

Keberagaman ini dapat menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan atau konflik yang berujung pada tindak kekerasan. Konflik antara penduduk pribumi dengan pemilik industri gula (orang Belanda) karena penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang Belanda. Seringkali konflik itu berakhir dengan pembakaran kebun-kebun tebu oleh penduduk pribumi. Konflik yang terjadi antara petani dengan penguasa pribumi atau elite lokal seperti kepala desa, dan juga dengan pemilik perkebunan (orang Eropa) karena eksploitasi, penindasan, dan kemiskinan yang kronis, telah mendorong petani melakukan apa yang disebut dengan membandit.¹⁷ Relasi sosial etnis Tionghoa dengan pribumi dapat berlangsung, tetapi masing-masing etnis itu tidak membaur, oleh karena itu sulit terjadi adaptasi budaya. Hal ini terjadi karena perbedaan budaya, agama, bahasa, dan cara pandang. Demikian pula, konflik keraton dengan Belanda karena politik intervensi Belanda pada kehidupan keraton, berujung Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Penduduk pribumi Jawa pada umumnya bersikap sangat sopan, rendah hati, nrima, dan sabar. Akan tetapi, mereka juga dapat cepat naik darah jika perasaannya sudah tidak dapat ditahan karena tekanan dan penghinaan.¹⁸ Penduduk pribumi Jawa sifatnya juga angkuh, demikian disebutkan dalam catatan Tome Pires.¹⁹ Dari paparan itu, paling tidak menjelang Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia, masyarakat Yogyakarta bersifat majemuk bukan masyarakat multikultural, karena di dalamnya terdapat hubungan antar etnis yang tidak setara, yang selalu hadir dalam bentuk dominasi, hegemoni, dan persaingan.

3. Yogyakarta Pasca Bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimana Yogyakarta pasca bergabung dengan Republik Indonesia? Pada masa-masa awal ini, kemajemukan sangat dihargai oleh pendiri bangsa Indonesia seperti Soekarno. Keberagaman dapat mendorong terjadinya persatuan bangsa, memperkuat bangsa, dan dapat membawa rakyat hidup sejahtera, tetapi sebaliknya, keberagaman dapat mendorong terjadinya kerusuhan antar warga jika tidak dikelola dengan baik. Pemikiran tersebut ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Burung Garuda yang merupakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep *Bhinneka* memang sudah ada dalam masyarakat Yogyakarta jauh sebelum bergabung dengan Negara Republik Indonesia, bahkan berlangsung hingga kini. Konsep *Ika* merupakan sebuah harapan yang masih harus terus diperjuangkan oleh masyarakat Yogyakarta.

Pada masa pemerintahan Soeharto, keberagaman kurang mendapat tempat. Bahkan ada kecenderungan untuk mengabaikan kelompok minoritas yakni orang Tionghoa. Mereka dilarang melakukan kegiatan keagamaan, menyelenggarakan budaya

¹⁷Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa Studi Historis 1850-1942* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 10.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 117-122.

¹⁹ Catatan Tome Pires: "Orang-orang Melayu memang angkuh namun keangkuhan ini sesungguhnya mereka dapatkan dari orang Jawa. Kita tidak perlu membanding-bandingkan, karena orang Jawa memang angkuh dan tinggi hati secara alami, sedangkan orang lain mendapatkan sifat ini melalui kecelakaan atau latihan. Lihat Tome Pires, *Suma Oriental Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*. Terjemahan Adrian Perkasa dan Anggita Pramesti (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. xiv-xv.

dan adat istiadatnya termasuk Imlek. Larangan ini tertuang dalam Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Berbagai perayaan yang bersifat keagamaan dan juga adat istiadat serta budaya Tionghoa seperti *Cap Go Meh*, *Ceng Beng*, Sembahyang Rebut, pementasan wayang petinghi, barongsai, liang-liong, dan lainnya hanya dapat dilakukan dalam lingkup keluarga dan tertutup. Menurut pemerintahan Soeharto, tahun baru Imlek dianggap sebagai bentuk afinitas (persamaan, ketertarikan) kultural masyarakat Tionghoa terhadap negeri asal dan dapat menjadi penghambat asimiliasi budaya. Bukan hanya larangan dalam menjalankan kegiatan agama dan budaya, tetapi juga pemaksaan untuk melepaskan identitasnya sebagai orang Tionghoa dan keharusan menerima budaya dominan. Hal ini dapat dilihat dari Instruksi Presidium Kabinet No.3/U/IN/1967 tentang Kebedjaksanaan Pokok Penjelesaian Masalah Tjina, masyarakat Tionghoa dipandang sebagai warga negara asing yang harus diasimilasikan, dengan melepaskan identitas ke-Tionghoa-anya. Larangan dan paksaan tersebut juga berlaku bagi masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. Orang Tionghoa di Yogyakarta yang kebanyakan tinggal di kawasan Malioboro, Kampung Ketandan, Pajeksan, dan Beskalan sejak 200 tahun yang lalu tidak menjalankan atau mungkin sembunyi-sembunyi dalam melakukan kegiatan keagamaan dan menyelenggarakan adat istiadat dan budayanya. Mereka termarjinalkan secara sosial dan budaya.

Setelah Presiden Soeharto jatuh dari kekuasaannya, masyarakat Yogyakarta memasuki masa reformasi. Masa ini ditandai oleh sikap hidup yang penuh dengan kebebasan (berbicara dan berserikat) yang hampir tanpa batas, dan hal ini dapat mengakibatkan disintegrasi sosial dan politik. Krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada dekade terakhir abad ke-20, telah mengakibatkan terjadinya krisis sosial-budaya dalam masyarakat. Penghargaan dan kepatuhan masyarakat pada hukum sangat berkurang; etika, moral, dan kesantunan sosial merosot; meluasnya penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, pelacuran, dan penggunaan narkoba; konflik dan kekerasan yang berlatar belakang SARA terus berkepanjangan seperti yang terjadi di Sumatera (Aceh), Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku Sulawesi Tengah, Maluku, dan akhir-akhir ini juga terjadi di Yogyakarta yang berupa penyerangan satu kelompok agama terhadap kelompok penganut agama lainnya.

Pada waktu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memerintah, melalui Keppres RI No. 6/2000, ia mencabut Inpres yang melarang orang Tionghoa menjalankan kegiatan agama dan menyelenggarakan adat istiadat dan budayanya. Lewat Keppres itu, Gus Dur memberikan kebebasan pada orang Tionghoa untuk merayakan Imlek dan mengekspresikan semangat religiusitasnya dengan penuh kebebasan dan kedamaian. Kebijakan politik Gus Dur tersebut juga membuka ruang dan inisiatif pembaruan berbagai peraturan yang diskriminatif dalam bidang kewarganegaraan, catatan sipil, dan anti diskriminasi.²⁰ Demikian pula, di Yogyakarta, seiring dengan angin segar reformasi, setiap menyambut tahun baru Imlek, di Kampung Ketandan diadakan pekan budaya Tionghoa. Kampung Ketandan dihias dengan ornamen-ornamen dan gapura berarsitektur Tionghoa. Festival yang diadakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini digelar sebagai upaya untuk mempertahankan identitas Kampung Ketandan.²¹

Dari semua itu, bagaimana relasi sosial orang Tionghoa dengan orang Jawa dan lainnya pada masa reformasi? Apakah mereka dapat saling berbaur meskipun pemukiman

²⁰ Imam S. Arizal, "Imlek, Gus Dur, dan Spirit Multikulturalisme", <http://www.gandingo.org/>, diunduh pada tanggal 9 Maret 2015 jam 15.47.

²¹ "Nuansa Tionghoa di Kampung Pecinan Ketandan Yogyakarta", <http://diwisata.com/kampung-pecinan-ketandan-yogyakarta.html>, diunduh tanggal 31 Maret 2015 jam 11.40.

saling berdampingan? Pada umumnya relasi sosial antara orang Tionghoa dengan orang Jawa dan orang Arab dapat berlangsung, tetapi sulit berbaur karena perbedaan agama dan budaya. Sebagian besar relasi sosial di antara mereka berdasarkan kepentingan ekonomi, keangkuhan, dan fanatisme terhadap budayanya sendiri. Mereka menganggap budayanya lebih unggul dari orang lain. Hal ini mengakibatkan timbulnya kesenjangan di antara mereka dan kadang kala dapat menyulut timbulnya kerusuhan walaupun harus diakui terdapat sejumlah orang Tionghoa melebur ke dalam budaya Jawa agar dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat Jawa. Seringkali kita mendengar umpatan atau gerutuan seperti: “*dasar durung njowo*” atau belum menjadi Jawa.²² Belum menjadi Jawa diartikan belum berbudaya dan beradab (memiliki sikap sopan santun, rendah hati, tepo sliro, dll).²³

Sehubungan dengan kehidupan demokrasi, perempuan Yogyakarta masih termarginalkan. Kaum hawa ini dianggap tidak setara dalam kehidupan politik. Perempuan dinilai makhluk lemah dan cocok untuk di rumah mengerjakan pekerjaan yang bersifat domestik. Dalam pemilu tahun 2004 dan pemilu pada periode selanjutnya, perempuan dilibatkan dalam pemilu untuk memenuhi kuota 30%, bagi keterwakilan perempuan. Hasil penelitian mengenai pemilu tahun 2004 di daerah Sleman dan Yogyakarta menunjukkan ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki yang dapat dilihat dari adanya surat izin bagi perempuan untuk mengikuti pemilu. Banyak orang tua, suami yang tidak mengizinkan perempuan mengikuti pemilu, karena perempuan dianggap tidak pantas berkiprah di dunia politik yang keras, licik, dan penuh fitnah.²⁴ Demikian pula dalam persoalan HAM, terjadi penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga yang tidak terbukti bersalah (wartawan Udin). Hukum juga tidak berpihak pada golongan bawah. Kejadian yang relatif baru adalah penyerangan suatu kelompok agama tertentu terhadap kelompok agama lain yang sedang menyelenggarakan ibadah dan perusakan sejumlah tempat usaha oleh kelompok yang mengatasnamakan agama.

Telah disinggung sebelumnya, seiring dengan perkembangan pendidikan, Kota Yogyakarta dibanjiri oleh penduduk dari berbagai daerah di Indonesia untuk belajar. Demikian pula, terdapat sejumlah penduduk dari daerah lain bermukim dan bekerja di kota Yogyakarta. Para mahasiswa membutuhkan tempat tinggal sementara, demikian pula pendatang baru yang bekerja juga membutuhkan tempat tinggal. Sejumlah pemerintah daerah membangun asrama mahasiswa di Yogyakarta untuk membantu penduduk mereka yang sedang belajar di daerah itu, seperti asrama Banuhampu (Sumatra), Asrama Medan, Asrama Kalimantan, dan Asrama Bali. Banyak penduduk Yogyakarta membuka tempat kos. Demikian pula, para pengembang perumahan atas izin dari pemerintah Yogyakarta mendirikan pemukiman-pemukiman baru. Penduduk Yogyakarta menjadi semakin majemuk dan mencerminkan miniatur Indonesia seperti yang dikatakan Sultan Hamengku Buwono X. Asrama mahasiswa berada ditengah-tengah pemukiman penduduk, tetapi mereka jarang sekali berinteraksi dengan penduduk

²² Menurut Geertz, “menjadi manusia adalah menjadi orang Jawa”. Orang dewasa normal yang mampu bertindak menurut pola-pola kebudayaan Jawa, dikatakan “*sampun njowo*” (sudah menjadi Jawa). Sebaliknya anak-anak kecil, orang gila, orang yang tidak bermoral dikatakan “*durung njowo*”. Lihat Geertz dalam Rustopo, *Menjadi Jawa : Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm 11.

²³ Lihat Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 55-59, lihat juga Budiono Herusatoto, *Simbolisme Jawa* (Yogyakarta: Ombak, 2008)

²⁴ Lucia Juningsih, “Pemilu Tahun 2004: Perjalanan Perempuan Sleman dari Dapur ke Gedung DPRD”. *Laporan Hasil Penelitian*, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2005.

setempat. Hal yang sama, mahasiswa yang tinggal di tempat kos juga jarang berinteraksi dengan penduduk setempat.

Banyak pemukiman baru didirikan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk yang jumlahnya semakin besar. Pemukiman baru itu bersifat majemuk, dihuni oleh berbagai etnis yang berbeda agama dan budaya. Di pemukiman baru ini, mereka membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pada etnis dan agama seperti kelompok orang Bali, orang Medan, orang Kalimantan, orang Makasar, orang Papua, Paguyuban Katholik, Kelompok Pengajian, dan Kelompok Iqrok. Bagaimana relasi sosial di antara mereka? Relasi sosial antar warga dapat berlangsung cukup baik meskipun terjadi gesekan-gesekan kecil, yang kadang kala berujung pada percecokan. Kegiatan “ngrumpi” menyoal status sosial dan ekonomi, perbedaan agama, dan tuduhan kafir pada kelompok penganut agama tertentu. Perbedaan agama ini menyebabkan kelompok minoritas seringkali terpinggirkan dan tidak mendapat tempat dalam berbagai kegiatan bahkan kehadirannya dipandang sebelah mata.

4. Membangun Masyarakat yang Multikultural

Apa itu multikultural? Multikultural berasal dari kata *multi* (plural) dan *kultural* (budaya) yang artinya banyak budaya atau keragaman budaya. Multikulturalisme adalah pemahaman dan cara pandang yang menekankan interaksi dengan memperhatikan keberadaan setiap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak-hak yang setara. Menurut Lawrence Blum,²⁵ multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain, sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.²⁶ Penilaian terhadap budaya lain tidak dimaksudkan untuk menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Menurut Dwicipta,²⁷ multikulturalisme merupakan cara pandang tentang manusia, tetapi bukan cara pandang yang menyamakan kebenaran-kebenaran lokal, melainkan membantu pihak-pihak yang saling berbeda untuk dapat membangun sikap saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan kemajemukan yang ada agar tercipta perdamaian dan dengan demikian kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Pengertian tentang multikulturalisme memiliki dua ciri yakni kebutuhan terhadap pengakuan dan legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya. Parsudi Suparlan mengatakan konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.²⁸

Bagaimana membangun masyarakat yang multikultural? Berbicara multikulturalisme mau tidak mau juga berbicara berbagai aspek yang mendukung gagasan ini yaitu demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM),

²⁵ Lawrence Blum dan Dwicipta, dalam Andre Ata Ujan Ph.D., *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan* (Jakarta: PT. INDEKS, 2011), hlm. 14.

²⁶ Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”. *Keynote Address* Simposium III Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.

²⁷ Dwicipta, dalam Andre Ata Ujan Ph.D., *loc.cit.*

²⁸ Parsudi Suparlan, *loc.cit.*

terjaminnya golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, karena multikulturalisme lahir dari benih-benih gagasan tersebut.²⁹ Menurut Suparlan, multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Keanekaragaman dalam masyarakat menuntut hadirnya budaya politik yang sesuai, dalam hal ini yakni budaya demokrasi, sebab dalam budaya ini kepentingan kelompok, perbedaan budaya dan agama, serta kepentingan perempuan dapat diakomodir. Demokrasi dianggap sebagai budaya politik yang paling memadai dalam upaya membangun masyarakat yang multikultural, karena menghargai kebebasan dan kesetaraan.³⁰ Selain demokrasi, membangun masyarakat multikultural juga menuntut hadirnya kepastian hukum dan jaminan hak asasi manusia. Upaya membangun hak asasi manusia harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat multikultural. Demikian pula sebaliknya, masyarakat multikultural mengandaikan adanya penegakan hak asasi manusia. Menjadi manusia dengan sendirinya menuntut pengakuan terhadap hak-haknya sebagai manusia seperti hak hidup dan hak menjalankan agamanya meskipun hidup bersama dengan orang lain. Pengakuan atas hak asasi manusia sebenarnya tidak lepas dari pengakuan akan keberagaman manusia. *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity* artikel 4 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan jaminan bagi keaneragaman budaya.³¹

Selanjutnya bagaimana menyebarkan gagasan masyarakat yang multikultural? Sehubungan dengan persoalan-persoalan seperti konflik yang berlatar belakang SARA dan intoleransi yang pernah terjadi di Yogyakarta, gagasan multikulturalisme kiranya sangat penting untuk disebarluaskan di Yogyakarta juga ke wilayah-wilayah lain. Penyebaran gagasan ini dapat melalui beberapa lembaga seperti lembaga pendidikan (formal dan non formal), politik (partai-partai politik), organisasi massa, media massa (cetak dan elektronika), keluarga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelompok arisan, Karang Taruna, dan lembaga keagamaan. Melalui hal itu diharapkan dapat dicapai masyarakat Yogyakarta yang menghargai perbedaan tanpa melahirkan konflik sosial. Mengapa hal ini penting dilakukan, karena perbedaan-perbedaan yang berujung pada kerusuhan sosial masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Yogyakarta. Kasus perusakan tempat ibadah oleh kelompok pendukung agama tertentu, ancaman bom, kasus penyerbuan kelompok agama pada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah, kasus pengrusakan tempat usaha, perkelahian antaretnis, dan perkelahian antar pendukung sepak bola rentan terjadi di Yogyakarta.

Telah disebutkan gagasan mengenai multikulturalisme dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus turung tangan untuk menata kembali kurikulum. Pendidikan multikultural harus diberi tempat dalam kurikulum. Hal ini juga perlu didukung oleh pengajar yang handal dan sejumlah buku ajar yang mampu melahirkan pemahaman tentang multikulturalisme.³²

²⁹ Parsudi Suparlan, *loc.cit.*

³⁰ F.X. Warsito Djoko S., "Budaya Politik Masyarakat Multikultural", dalam Andre Ata Ujan, Ph.D., et.al., *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan* (Jakarta: PT. INDEX, 2011), hlm. 41-45.

³¹ *Ibid.*, hlm. 41-80.

³² Prof. Dr. Wasino, M.Hum, "Multikulturalisme dalam Perspektif Sejarah Sosial". *Makalah* dalam Seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Semarang pada Hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 11-12

5. Penutup

Gagasan multikulturalisme dapat mendorong lahirnya masyarakat yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan patuh pada hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman mengenai makna multikultural dapat menyebabkan hubungan antaretnis dalam masyarakat berlangsung kurang harmonis. Kesatuan bangsa dan integrasi nasional yang didasarkan pada politik kebudayaan yang seragam dianggap kurang relevan dengan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Ata Ujan Ph.D. *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT. INDEKS, 2011.
- Anton Haryono. "Industri Pribumi Daerah Yogyakarta Masa Kolonial 1830-an-1930-an". Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Budiono Herusatoto. "Simbolisme Jawa". Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Furnival, J.S. *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute, 2009.
- Hikmat Budiman. "Editorial Yayasan Interseksi Hak Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas", dalam Hikmat Budiman, ed. *Hak Minoritas Dilema ultikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: The Interseksi Foundation, 2007.
- Imam S. Arizal. "Imlek, Gus Dur, dan Spirit Multikulturalisme", <http://www.gandingo.org/>. diunduh pada tanggal 9 Maret 2015 jam 15.47.
- Inajati Adrisijanti. "Kota Yogyakarta Sebagai Kawasan Pusaka". Disajikan dalam Diskusi Sejarah "Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah", yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 11 -12 April 2007.
- Juningsih, Lucia. "Pemilu Tahun 2004: Perjalanan Perempuan Sleman dari Dapur ke Gedung DPRD". *Laporan Hasil Penelitian*, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2005.
- Moedjanto, G. *Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003.
- Mulder, Niels. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Parsudi Suparlan. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". *Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.
- "Pecinan-Ketandan, Yogyakarta" <http://pecinanjogja.blogspot.com/p/akuuuuuu.html>, diunduh tanggal 31 Maret 2015 jam 10.21.
- Pires, Tome. *Suma Oriental Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*. Terjemahan Adrian Perkasa dan Anggita Pramesti. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rustopo. *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Jilid 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Warsito Djoko S, F.X. "Budaya Politik Masyarakat Multikultural" dalam Andre Ata Ujan, Ph.D. et al. *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT. INDEX, 2011.